

Reintegration: BRA's roles in the past and its future visions

Leena Avonius

This paper analyses the implementation of the Helsinki MoU articles on reintegration from 2005 to late 2010, paying particular attention to the Aceh Reintegration Agency (BRA). Since its establishment in February 2006 BRA has had its ups and downs. BRA has suffered from repeated restructurings and politicisation of its programs. So far the Indonesian national government has allocated around two trillion Rupiah to reintegration, while Aceh provincial government has allocated some four hundred billion Rupiah. There are differing opinions in Aceh and in Indonesia whether more funds should be allocated to reintegration programs in the future. In 2005-2009 BRA spent 42% of its budgeted funds for rebuilding houses and 35% for economic empowerment. The third largest program has been *diyat*, the compensation for families of persons killed or who disappeared during the conflict. None of these programs have been completed. BRA has built almost thirty thousand houses, and expects to complete the program in 2011. The agency admits that in some districts up to 30 % of houses may have been allocated to non-eligible persons. BRA's economic empowerment program has been extended to several beneficiary groups that were not mentioned in the MoU. The program has mostly preferred non-sustainable cash assistance, and very little effort has been put to providing new skills to beneficiaries. Furthermore, the MoU article on the allocation of farming land is still outstanding. There have also been few efforts to establish a Joint Claims Settlement Commission that will be needed to handle any complaints related to reintegration programs and gaps left by BRA. While the problems in BRA's programs are similar to those in reintegration processes elsewhere, they are clearly a consequence of systematic failure in the Aceh peace process to determine the aims and limits of reintegration.

Reintegrasi: Peran BRA di masa lampau dan visinya kedepan

Leena Avonius

Paper ini menganalisa implementasi pasal-pasal Mou Helsinki mengenai reintegrasi dari tahun 2005 hingga akhir 2010, dengan memberikan perhatian khusus terhadap Badan Reintegrasi Aceh (BRA). Sejak didirikan pada bulan Februari 2006, BRA telah mengalami kemajuan dan kemunduran. BRA telah mengalami beberapa kali restrukturisasi dan politisasi terhadap program-programnya. Sejauh ini, pemerintah pusat telah mengalokasikan sekitar dua triliun rupiah untuk dana integrasi, sedangkan pemerintah propinsi Aceh telah mengalokasikan sekitar empat ratus miliar rupiah. Terjadi perbedaan pendapat baik di Aceh maupun di Indonesia mengenai apakah dana-dana tambahan perlu dialokasikan untuk program reintegrasi dimasa mendatang. Dalam tahun 2005-2009 BRA menghabiskan 42% dari dana-dana yang dianggarkan untuk pembangunan kembali rumah-rumah dan 35% untuk pemberdayaan ekonomi. Program ketiga terbesar adalah *diyat*, yaitu ganti rugi untuk keluarga orang-orang yang terbunuh atau yang dihilangkan selama masa konflik. Tak ada satupun dari program ini yang rampung. BRA telah membangun hampir tiga puluh ribu rumah, dan berharap untuk merampungkan program tersebut pada tahun 2011. BRA mengakui kemungkinan bahwa 30 % dari rumah-rumah yang dibangun di beberapa kabupaten telah dialokasikan kepada orang-orang yang tidak memenuhi syarat. Program pemberdayaan ekonomi BRA telah diperluas hingga ke beberapa kelompok penerima manfaat yang tidak diatur dalam MoU. Program tersebut sebagian besar telah mengarah pada bantuan uang tunai (cash) yang sifatnya tidak

berkelanjutan, dan sangat sedikit upaya yang dilakukan untuk memberikan keahlian-keahlian (skill) baru kepada penerima manfaat. Disamping itu, pasal MoU mengenai alokasi tanah pertanian masih dipandang sebagai sebuah permasalahan penting. Sangat sedikit upaya yang telah dilakukan untuk membentuk Komisi Bersama Penuntasan Klaim (Joint Claims Settlement Commission) yang akan diperlukan untuk menangani berbagai keluhan (tuntutan) yang berkaitan dengan program-program dan kesenjangan-kesenjangan reintegrasi yang ditinggalkan oleh BRA. Sementara itu, masalah-masalah dalam program-program BRA memiliki keserupaan dengan masalah-masalah dalam proses reintegrasi yang terjadi di negara lain; masalah-masalah tersebut jelas merupakan akibat dari kegagalan sistematis dalam proses perdamaian Aceh dalam menentukan tujuan-tujuan dan batas-batas reintegrasi.